



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Nomor : 345/M-IND/8/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Dukungan Penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2016 (SE-2016)
Pendataan UMK dan UMB Tahun 2017

Jakarta, 7 Agustus 2017

Kepada Yth.

Para Pimpinan Asosiasi di Sektor Industri
(Daftar terlampir)

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : B-426/BPS/6130-SE2016/07/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal Dukungan terhadap Penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2016 (SE 2016) Pendataan UMK dan UMB Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor : 342/M-IND/08/2017 tanggal 3 Agustus 2017, bersama ini disampaikan kepada Para Pimpinan Asosiasi di Sektor Industri agar dapat memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya Sensus Ekonomi 2016 Pendataan UMK dan UMB Tahun 2017.

Bagi pemerintah, hasil Sensus Ekonomi 2016 Pendataan UMK dan UMB Tahun 2017 tersebut akan sangat berguna sebagai dasar perencanaan ekonomi, mengetahui potensi ekonomi, peta penyebaran tiap sektor usaha, penyerapan tenaga kerja, penghitungan nilai tambah yang lebih akurat dan sebagainya. Sedang bagi Dunia Usaha hasil Sensus Ekonomi 2016 Pendataan UMK dan UMB Tahun 2017 bermanfaat antara lain sebagai dasar perencanaan pengembangan usaha, penentuan pangsa pasar, potensi pasar dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Para Pimpinan Asosiasi dapat menghimbau anggotanya untuk dapat mensukseskan Sensus Ekonomi 2016 Pendataan UMK dan UMB Tahun 2017 dengan membantu para Petugas Pencacah/Pendata untuk memberikan jawaban yang benar dan akurat.

Demikian, atas perhatian dan dukungannya disampaikan terima kasih.

**A.n. Menteri Perindustrian
Sekretaris Jenderal**



Haris Munandar N

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pusat Statistik;
3. Para Dirjen di lingkungan Kemenperin;
4. Petinggal.

Lampiran Surat

Nomor : 345/M-IND/08/2017

Tanggal : 7 Agustus 2017

1. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
2. Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo)
3. Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI)
4. Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO)
5. Asosiasi Permebelan & Kerajinan Indonesia (ASMINDO)
6. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
7. Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (ISWA)
8. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
9. Asosiasi Industri Sabun Indonesia (AISI)
10. Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI)
11. Persatuan Industri Baterai Kering Indonesia (PIBIN)
12. Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFi)
13. Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI)
14. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi)
15. Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (AKIDA)
16. Asosiasi Produsen Garam Beryodium (APROGAKOB)
17. Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI/BAN)
18. Asosiasi Semen Indonesia (ASI)
19. Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS)
20. Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI)
21. Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA)
22. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Baja Indonesia (APKOBI)
23. Asosiasi Industri Dan Perdagangan Mesin Konstruksi Indonesia (AIMKI)
24. Asosiasi Industri Mesin Perkakas Indonesia (ASIMPI)
25. Asosiasi Industri Peralatan Pabrik Indonesia (AIPPI)
26. Gabungan Industri Elektronika Dan Alat-Alat Listrik Rumah Tangga (GB ELEKTRONIKA)
27. Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI)
28. Asosiasi Pabrik Kabel Listrik Indonesia (APKABEL)
29. Asosiasi Industri Luminer Dan Kelistrikan Indonesia (AILKI)
30. Asosiasi Motor Bakar Indonesia (ABI)
31. Asosiasi Perusahaan Alat & Mesin Pertanian Indonesia (ALSINTANI)
32. Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO)
33. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI/PASMI)
34. Asosiasi Industri Mesin & Peralatan Indonesia (AIRMEPI)

35. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)
36. Asosiasi Industri Jaringan Pipa Indonesia (IPIA)
37. Asosiasi Industri Ketel Uap dan Bejana Bertekan Indonesia (AKUBBI)
38. Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (APLINDO)
39. Asosiasi Industri Perkakas Pertisi Indonesia (AIPPINDO)
40. Asosiasi Industri Pompa Seluruh Indonesia (AIPSI)
41. Asosiasi Pengerjaan Logam dan Permesinan (ASPEP)
42. Gabungan Industri Alat-Alat Mobil & Motor (GIAMM)
43. Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO)
44. Asosiasi Apparel Manufactur Indonesia (AMI)
45. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
46. Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI)
47. Asosiasi Produsen Garmen Indonesia (APGI)
48. Asosiasi Pelumas Indonesia (ASPELINDO)
49. Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI)
50. Gabungan Perusahaan Industri Retsluiting Indonesia (GAPIRI)
51. Asosiasi Pertambangan Indonesia
52. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI-ICMA)
53. Gabungan Pengusaha Jamu Dan Obat Tradisional (GP Jamu)
54. Asosiasi Gula Indonesia (AGI)
55. Gabungan Perngusaha Makanan & Minuman Indonesia (GAPPMI)
56. Asosiasi Industri Minuman Ringan Indonesia (ASRIM)
57. Asosiasi Teh Indonesia (ATI)
58. Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO)
59. Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI)
60. Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (NAMPA)
61. Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI)
62. Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO)
63. Asosiasi Produsen Pakan Ternak Indonesia (GPMT)
64. Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI)
65. Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO)
66. Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI)
67. Asosiasi Pengusaha Gula & Tepung Terigu Indonesia (APEGTI)
68. Asosiasi Perusahaan Komputer Indonesia (APKOMINDO)
69. Asosiasi Perusahaan Telekomunikasi Indonesia (APNATEL)
70. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
71. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
72. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI)

73. Junior Chamber International-Indonesia (JCI-Indonesia)
74. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)
75. Himpunan Industri Kecil Seluruh Indonesia (HIKSI)
76. Dewan Kerjasama Ekonomi Indonesia-Cina (ICBC)
77. Asosiasi Usaha Menengah Indonesia (AUMI)
78. Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 (Kosgoro)
79. Perkumpulan Ekonomi Indonesia Jerman (EKONID)
80. Kemitraan Usaha Nasional Indonesia (KUNI)
81. Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo)
82. Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia (AIPI)
83. Asosiasi Industri Animasi dan Konten Indonesia (AINAKI)
84. Asosiasi Perangkat Lunak Telematika Indonesia (ASPILUKI)
85. Masyarakat Telematika (Mastel)
86. Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (GAMMA)
87. Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI)
88. Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (HINABI)
89. Asosiasi Valve LPG Indonesia (AVINDO)
90. Asosiasi Pabrikan Regulator Indonesia (APREGI)
91. Asosiasi Industri Perlampuan Listrik Indonesia (APERLINDO)
92. Federasi Pengemasan Indonesia
93. Gabungan Forwader & Ekspedisi Indonesia (Gafeksi)
94. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
95. Asosiasi Sintetik Resin Indonesia (ARSI)
96. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI)
97. Asosiasi Pabrikan Tower Indonesia (ASPATINDO)
98. Gabungan Pabrik Pipa Baja Indonesia (GAPIPA)
99. Asosiasi Produsen Aluminium Ekstrusi Indonesia (APRALEX)
100. Asosiasi Kaca Lembaran Dan Pengaman Indonesia (AKLP)
101. Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI)
102. Gabungan Elektronika Indonesia (GABEL)



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Jakarta, 3 Agustus 2017

Kepada

Yth. **Para Pelaku Usaha
Sektor Perindustrian**

Di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 342/M-IND/8/2017

**TENTANG
DUKUNGAN DALAM RANGKA
KEGIATAN LANJUTAN SENSUS EKONOMI 2016
PENDATAAN UMK DAN UMB TAHUN 2017**

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-426/BPS/6130-SE2016/07/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal Dukungan terhadap Penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2016 Pendataan UMK dan UMB tahun 2017, bersama ini diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016 telah diselenggarakan Sensus Ekonomi 2016 dengan kegiatan pendaftaran usaha/perusahaan di seluruh Indonesia. Di tahun 2017 kegiatan Sensus Ekonomi akan dilanjutkan dengan kegiatan pendataan yang lebih rinci untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB) di Indonesia.
2. Kegiatan lanjutan Sensus Ekonomi 2016, yaitu pendataan UMK dan UMB akan dilaksanakan pada bulan **Agustus-September tahun 2017** secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, mencakup semua sektor kecuali sektor pertanian.
3. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan pendataan UMK dan UMB tersebut akan sangat berguna antara lain sebagai dasar perencanaan ekonomi, mengetahui potensi ekonomi, penyerapan tenaga

kerja, dan penghitungan nilai tambah yang lebih akurat. Bagi dunia usaha juga bermanfaat antara lain sebagai dasar perencanaan pengembangan usaha, penentuan pangsa pasar, dan potensi pasar.

4. Pelaksanaan kegiatan pendataan UMK dan UMB di lapangan akan dikoordinasikan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, dibutuhkan dukungan dari semua pimpinan institusi pemerintah termasuk dari Menteri Perindustrian beserta jajarannya di seluruh Indonesia.
5. Saya mendukung kegiatan ini dengan menghimbau para pelaku usaha sektor industri agar membantu petugas pencacah pendataan UMK dan UMB SE2016 dengan memberikan jawaban yang benar serta faktual.

Demikian agar menjadi maklum dan untuk dilaksanakan.


MENTERI PERINDUSTRIAN

AIRLANGGA HARTARTO

Tembusan :

Yth. Kepala Badan Pusat Statistik

SURAT EDARAN

No : E-41 /DM000/08/2017

Kepada : Kepala Divisi Regional Selindo
Dari : Direktur Utama
Perihal : Dukungan Dalam Rangka Kegiatan Lanjutan Sensus
Ekonomi 2016 Pendataan UMK dan UMB Tahun 2017

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pusat Statistik nomor : B-426/BPS/6130-SE2016/07/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal Dukungan Terhadap Penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2016 Pendataan UMK dan UMB tahun 2017, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016 telah diselenggarakan Sensus Ekonomi 2016 dengan kegiatan pendaftaran usaha/perusahaan diseluruh Indonesia. Pada tahun 2017 kegiatan sensus Ekonomi 2016 akan dilanjutkan dengan kegiatan pendataan yang lebih rinci untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB) di Indonesia.
2. Kegiatan pendataan UMK dan UMB SE2016 tersebut akan dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2017 serentak di seluruh wilayah Indonesia, mencakup semua sektor kecuali pertanian.
3. Pelaksanaan kegiatan pendataan UMK dan UMB SE2016 tersebut akan dikoordinasikan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.
4. Agar saudara dapat mendukung kegiatan tersebut dan memberikan jawaban yang benar serta faktual.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 18 Agustus 2017



Perum BULOG

BULOG
Direksi
Djarot Kusumayakti
Direktur Utama

Tembusan Yth:

1. Para Direksi
2. Para Kadiv
3. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Ketua Umum KADIN Indonesia
2. Asosiasi Pelaku Usaha Sektor Perdagangan
3. Pelaku Usaha Sektor Perdagangan

SURAT EDARAN

Nomor : 04/M-DAG/SE/7/2017

TENTANG

**DUKUNGAN DALAM RANGKA KEGIATAN LANJUTAN SENSUS EKONOMI 2016
PENDATAAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)
DAN USAHA MENENGAH BESAR (UMB) TAHUN 2017**

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-426/BPS/6130-SE2016/07/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal Dukungan terhadap Penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2016 Pendataan UMK dan UMB tahun 2017, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016 telah diselenggarakan Sensus Ekonomi 2016 dengan kegiatan pendaftaran usaha/perusahaan di seluruh Indonesia. Di tahun 2017 kegiatan Sensus Ekonomi akan dilanjutkan dengan kegiatan pendataan yang lebih rinci untuk (UMK) dan (UMB) di Indonesia.
2. Kegiatan lanjutan Sensus Ekonomi 2016, yaitu pendataan UMK dan UMB akan dilaksanakan pada bulan Agustus-September tahun 2017 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, mencakup semua sektor kecuali sektor pertanian.
3. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan pendataan UMK dan UMB tersebut akan sangat berguna antara lain sebagai dasar perencanaan ekonomi, mengetahui potensi ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan penghitungan nilai tambah yang lebih akurat. Bagi dunia usaha juga bermanfaat antara lain sebagai dasar perencanaan pengembangan usaha, penentuan pangsa pasar, dan potensi pasar.
4. Pelaksanaan kegiatan pendataan UMK dan UMB di lapangan akan dikoordinasikan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, dibutuhkan dukungan dari semua pimpinan institusi pemerintah termasuk dari Menteri Perdagangan beserta jajarannya di seluruh Indonesia.
5. Saya mendukung kegiatan ini dengan menghimbau para pelaku usaha sektor perdagangan agar membantu petugas pencacah pendataan UMK dan UMB SE2016 dengan memberikan jawaban yang benar serta faktual.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya Saudara kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juli 2017

Menteri Perdagangan R.I.



Anggadiasto Lukita

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala BPS;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan;
6. Kepala Dinas yang Membidangi Perdagangan Provinsi/Kabupaten/Kota;

Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
☎ 62 (021) 386 0382, 2352 3404 Fax. 62 (021) 384 6106



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-666/MBU/S/08/2017 Jakarta, 08 Agustus 2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Dukungan dalam rangka Kegiatan Lanjutan Sensus Ekonomi 2016
Pendataan UMK dan UMB Tahun 2017

Yth. Direktur Utama BUMN (sebagaimana terlampir)
di –
Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-426/BPS/6130-SE2016/07/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal Dukungan terhadap Penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2016 Pendataan UMK dan UMB tahun 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016 telah diselenggarakan Sensus Ekonomi 2016 dengan kegiatan pendaftaran usaha/perusahaan di seluruh Indonesia. Di tahun 2017 kegiatan Sensus Ekonomi akan dilanjutkan dengan kegiatan pendataan yang lebih rinci untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB) di Indonesia.
2. Kegiatan lanjutan Sensus Ekonomi 2016, yaitu pendataan UMK dan UMB akan dilaksanakan pada bulan Agustus-September tahun 2017 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, mencakup semua sektor kecuali sektor pertanian.
3. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan pendataan UMK dan UMB tersebut akan sangat berguna antara lain sebagai dasar perencanaan ekonomi, mengetahui potensi ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan penghitungan nilai tambah yang lebih akurat. Bagi dunia usaha juga bermanfaat antara lain sebagai dasar perencanaan pengembangan usaha, penentuan pangsa pasar, dan potensi pasar.
4. Pelaksanaan kegiatan pendataan UMK dan UMB di lapangan akan dikoordinasikan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, dibutuhkan dukungan dari semua Pimpinan Institusi Pemerintah termasuk dari Menteri Badan Usaha Milik Negara beserta jajarannya di seluruh Indonesia.

5. Berkenaan...2/



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

5. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami menghimbau BUMN turut mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan lanjutan Sensus Ekonomi 2016 tersebut. Untuk itu, Saudara kiranya dapat memberikan himbauan bagi UMK binaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara untuk dapat membantu petugas pencacah pendataan UMK dan UMB Sensus Ekonomi 2016 dengan memberikan jawaban yang benar dan faktual.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri BUMN RI

Sekretaris Kementerian BUMN



Iram Apriyanto Putro

Tembusan Yth :

1. Menteri BUMN RI;
2. Kepala Badan Pusat Statistik;
3. Para Eselon I Kementerian BUMN RI.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Nomor : S-666/MBU/S/08/2017

Tanggal : 08 Agustus 2017

DAFTAR BUMN

1. Perum Bulog
2. Perum Damri
3. Perum Jamkrindo
4. Perum Jasa Tirta I
5. Perum Jasa Tirta II
6. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
7. Perum LKBN Antara
8. Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta
9. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
10. Perum Perhutani
11. Perum Perikanan Indonesia
12. Perum Perumnas
13. Perum Peruri
14. Perum Produksi Film Negara
15. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
16. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
17. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
18. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
19. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
20. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
21. PT Indofarma (Persero) Tbk
22. PT Kimia Farma (Persero) Tbk
23. PT Jasa Marga (Persero) Tbk
24. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
25. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
26. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
27. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
28. PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
29. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
30. PT Timah (Persero) Tbk
31. PT Adhi Karya (Persero) Tbk
32. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
33. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
34. PT Waskita Karya (Persero) Tbk
35. PT Amarta Karya (Persero)
36. PT Angkasa Pura I (Persero)
37. PT Angkasa Pura II (Persero)



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-4-

38. PT Asabri (Persero)
39. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
40. PT Askrindo (Persero)
41. PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
42. PT Bahana PUI (Persero)
43. PT Balai Pustaka (Persero)
44. PT Barata Indonesia (Persero)
45. PT Berdikari (Persero)
46. PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
47. PT Bina Karya (Persero)
48. PT Bio Farma (Persero)
49. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
50. PT Boma Bisma Indra (Persero)
51. PT Brantas Abipraya (Persero)
52. PT Primiissima (Persero)
53. PT Dahana (Persero)
54. PT Danareksa (Persero)
55. PT Dirgantara Indonesia (Persero)
56. PT Djakarta Lloyd (Persero)
57. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
58. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
59. PT Energy Management Indonesia (Persero)
60. PT Garam (Persero)
61. PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
62. PT Hutama Karya (Persero)
63. PT Iglas (Persero)
64. PT Inalum (Persero)
65. PT Indah Karya (Persero)
66. PT Indonesia Tourism Development Corporation (Persero)
67. PT Indra Karya (Persero)
68. PT Industri Kapal Indonesia
69. PT Industri Kereta Api (Persero)
70. PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)
71. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
72. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
73. PT Istaka Karya (Persero)
74. PT Jasa Raharja (Persero)
75. PT Jasindo (Persero)
76. PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
77. PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
78. PT Kawasan Industri Medan (Persero)



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-5-

79. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
80. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
81. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
82. PT Kertas Leces (Persero)
83. PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
84. PT LEN Industri (Persero)
85. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
86. PT PAL Indonesia (Persero)
87. PT PANN (Persero)
88. PT Pegadaian (Persero)
89. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
90. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
91. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
92. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
93. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
94. PT Perikanan Nusantara (Persero)
95. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
96. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
97. PT Pertamina (Persero)
98. PT Pertani (Persero)
99. PT Perusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
100. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
101. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
102. PT Pindad (Persero)
103. PT PLN (Persero)
104. PT Pos Indonesia (Persero)
105. PT Pupuk Indonesia (Persero)
106. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
107. PT RNI (Persero)
108. PT Sang Hyang Seri (Persero)
109. PT Sarinah (Persero)
110. PT Semen Kupang (Persero)
111. PT Sucofindo (Persero)
112. PT Survei Udara Panas (Persero)
113. PT Surveyor Indonesia (Persero)
114. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)
115. PT Taspen (Persero)
116. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
117. PT Virama Karya (Persero)
118. PT Yodya Karya (Persero)
119. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-6-

120.PT Surabaya Industrial Estate Rungkut

121.PT Nindya Karya



Bandung, 21 Juli 2017

Nomor : 2567/Setper-1/0717
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Dukungan Terhadap Penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2016
Pendataan UMK dan UMB Tahun 2017**

**Kepada
Ka. Regional 1 s.d. 11**

Merujuk surat dari Badan Pusat Statistik nomor: B-426/BPS/6130-SE2016/07/2017 tanggal 12 Juli 2017 diberitahukan bahwa PT Pos Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang terdaftar dalam kegiatan Sensus Ekonomi 2016 yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2017.

Sehubungan dengan itu, mohon dukungan Saudara untuk mempersiapkan data-data yang akurat pada waktunya.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan

CAHYAT ROHYANA
Nippos 968253430

PT POS INDONESIA (PERSERO)
GRAHA POS INDONESIA

Jl. Banda No.30 Bandung 40115
Telp. 022 – 4213640, 4213641, 4213646
Fax. 022 - 4267725, 022 – 4267744
<http://www.posindonesia.co.id>



Nomor : SRT-0192 SKKMC1000/2017/S0 Jakarta, 07 AUG 2017
Lampiran : 1 (satu) berkas Yang Terhormat,
Perihal : Rekomendasi Dukungan KKKS terlampir
Penyelenggaraan Sensus di Tempat
Ekonomi 2016 Pendataan UMK Up. : VP Public & Government Affairs
dan UMB Tahun 2017

Merujuk surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : B-426/BPS/6130-SE2016/07/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal Dukungan Penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2016 Pendataan UMK dan UMB Tahun 2017, bersama ini kami sampaikan bahwa SKK Migas pada prinsipnya mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2017 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka Kontraktor KKS diminta untuk berpartisipasi dan mendukung kegiatan dimaksud pada surat terlampir serta dapat menyampaikan konfirmasi dukungan kegiatan kepada SKK Migas c.q. Departemen Komunikasi melalui email : snuryadin@skkmigas.go.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi,

Wisnu Prabawa Taher

Tembusan :

1. Kepala SKK Migas
2. Kepala Badan Pusat Statistik
3. Sekretaris SKK Migas
4. Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas
5. Kepala Divisi Formalitas



Lampiran Surat

Nomor : SRT-0192 /SKKMC1000/2017/S0

Tanggal : 07 AUG 2017

KKKS :

1. Total EP Indonesia
2. Chevron Indonesia
3. Pertamina EP
4. BP Indonesia
5. ConocoPhillips Indonesia Inc
6. Vico Indonesia
7. ExxonMobil Cepu Ltd.
8. PHE ONWJ
9. PetroChina International
10. CNOOC SES
11. Premier Oil
12. PHE WMO
13. Medco EP Indonesia
14. Santos
15. Kangean Energy Indonesia
16. Star Energy
17. Kalrez Petroleum
18. Inpex
19. Petronas Carigali
20. Husky CNOOC Madura Ltd.
21. Genting Oil
22. Pearl Oil
23. Statoil
24. JOB P Talisman Jambi Merang
25. JOB P Talisman (OK)
26. JOB P Medco Tomori
27. JOB P Medco Simenggaris
28. PEP Nunukan
29. JOB P Talisman Sakakemang
30. PEP Cepu





BADAN PUSAT STATISTIK



Nomor : B-426/BPS/6130-SE2016/07/2017
Lampiran : Leaflet dan Draft Surat Edaran
Perihal : **Dukungan terhadap Penyelenggaraan
Sensus Ekonomi 2016 Pendataan UMK dan UMB
Tahun 2017**

Jakarta, 12 Juli 2017

Kepada Yang Terhormat :

**Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)**

di

Jakarta

Bersama ini kami informasikan bahwa pada tahun 2016 telah diselenggarakan Sensus Ekonomi 2016 dengan kegiatan pendaftaran usaha/perusahaan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2017 kegiatan Sensus Ekonomi 2016 akan dilanjutkan dengan kegiatan pendataan yang lebih rinci untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB) di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan pendataan UMK dan UMB SE2016 akan dilaksanakan pada bulan Agustus-September tahun 2017 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, mencakup semua sektor kecuali sektor pertanian.
2. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan pendataan UMK dan UMB SE2016 tersebut akan sangat berguna antara lain sebagai dasar perencanaan ekonomi, mengetahui potensi ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan penghitungan nilai tambah yang lebih akurat. Bagi dunia usaha juga bermanfaat antara lain sebagai dasar perencanaan pengembangan usaha, penentuan pangsa pasar, dan potensi pasar.
3. Pelaksanaan kegiatan pendataan UMK dan UMB SE2016 di lapangan akan dikoordinasikan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, kami memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk Perusahaan yang Bapak pimpin yang mempunyai jaringan yang luas.

4. Pada kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak, untuk mendukung kegiatan pendataan UMK dan UMB SE2016 SE2016 dengan menghimbau semua anggota asosiasi yang Bapak Pimpin untuk memberikan jawaban yang benar serta faktual.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan dukungan Bapak disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suhariyanto

Tembusan sebagai laporan:

1. Yth. Bapak Wakil Presiden
2. Yth. Bapak Menko Bidang Perekonomian
3. Yth. Bapak Meneg PPN/Ketua Bappenas

DRAFT

Lambang Kemen BUMN

Jakarta, Juli 2017

Kepada

Yth. **Para Pelaku Usaha**
Badan Usaha Milik Negara

Di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor :

TENTANG
DUKUNGAN DALAM RANGKA
KEGIATAN LANJUTAN SENSUS EKONOMI 2016 Pendataan UMK dan UMB
Tahun 2017

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-426/BPS/6130-SE2016/07/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal Dukungan terhadap Penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2016 Pendataan UMK dan UMB tahun 2017, bersama ini diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016 telah diselenggarakan Sensus Ekonomi 2016 dengan kegiatan pendaftaran usaha/perusahaan di seluruh Indonesia. Di tahun 2017 kegiatan Sensus Ekonomi akan dilanjutkan dengan kegiatan pendataan yang lebih rinci untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB) di Indonesia.
2. Kegiatan lanjutan Sensus Ekonomi 2016, yaitu pendataan UMK dan UMB akan dilaksanakan pada bulan **Agustus-September tahun 2017** secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, mencakup semua sektor kecuali sektor pertanian.
3. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan pendataan UMK dan UMB tersebut akan sangat berguna antara lain sebagai dasar perencanaan ekonomi, mengetahui potensi ekonomi, penyerapan tenaga

kerja, dan penghitungan nilai tambah yang lebih akurat. Bagi dunia usaha juga bermanfaat antara lain sebagai dasar perencanaan pengembangan usaha, penentuan pangsa pasar, dan potensi pasar.

4. Pelaksanaan kegiatan pendataan UMK dan UMB di lapangan akan dikoordinasikan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, dibutuhkan dukungan dari semua pimpinan institusi pemerintah termasuk dari Menteri Badan Usaha Milik Negara beserta jajarannya di seluruh Indonesia.
5. Saya mendukung kegiatan ini dengan menghimbau para pelaku usaha Badan Usaha Milik Negara agar membantu petugas pencacah pendataan UMK dan UMB SE2016 dengan memberikan jawaban yang benar serta faktual.

Demikian agar menjadi maklum dan untuk dilaksanakan.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

RINI SOEMARNO

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pusat Statistik

<p>Versi word dokumen ini sebagai rujukan bisa diunduh di tautan berikut : http://s.bps.go.id/draftdukunganse</p>

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

**LEMBAR PENERUS
KEPALA**

Penerimaan ke:

No.	Nomor Agenda	Tanggal Terima				Diteruskan kepada	Klasifikasi Surat		Derajat Surat	
	2538	31	10/07/2017			Divisi/Bagian	Sangat Rahasia	Rahasia	Segera	Biasa
	Diteruskan Kepada	K	DK	I	F		Disposisi			
1	Wakil Kepala									
2	Sekretaris SKK Migas	✓				P&K	SDM	MSTI	F&K	
3	Pengawas Internal									
4	Deputi Perencanaan					Eks	T&PL	Ept	PK	RA
5	Deputi Operasi					OP& PS	OP	MPPF	PO	UPP
6	Deputi Keuangan dan Monetisasi					SB& MRP	AKT	AK Eks	AK Ept	MM
7	Deputi Pengendalian Pengadaan					PRS & AB	PPEJ	PA		
8	Deputi Dukungan Bisnis					H	SDM & SCM	F	Pwk	
9	T.A. Bapak Awang Harun S.					<p><i>Uffs Bpk Sekretaris, mohon ept di asort. Terima kasih</i></p> <p align="right"><i>[Signature]</i> 11/8/2017</p>				
10	T.A. Bapak Budi Ibrahim									
11	T.A. Bapak Mudji Prihatmoko									
12	T.A. Bapak Sampe L. Purba									
13	P.A. Bapak Anang Pratanto									
14	P.A. Bapak Kasyunnil Kamal									
15	P.A. Bapak Leonardus J.E. Nugroho									
16	P.A. Bapak Yosaphat Toto Subagyo									
17	Sekretaris Kepala SKK Migas									
<p>Catatan Sekretaris : Sesuai arahan Kepala SKK Migas surat didisposisi oleh Wakil Kepala SKK Migas.</p>										
Lampiran (Jumlah/Bentuk):		Kode Simpan:				Paraf Sekretaris: <i>[Signature]</i> 11/8/17				

K= Kerjakan; DK=Dukung Kerjakan; I=Info; F=File

